

**MDGS AS AN INSTRUMENT OF HEGEMONY:  
A NEW TYPE OF HEGEMONIC TRANSFORMATIVE FOR VANISHING  
PLURALITY OF RESISTENCE MOVEMENTS IN INDONESIA**

**Joko Purnomo**

Dosen Jurusan Hubungan Internasional  
Universitas Brawijaya, Malang, E-mail: Jekik\_purnomo@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Since 1990s, development discourse has been focused into the fulfillment of Millennium Development Goals (MDGs). With the help from western countries, international development agencies and international financial institutions, MDGs have raised its popularity in developing country and steering the development agenda of developing country. The increase in the use of MDGs as a development goal in developing country, however, can not be seen solely as a triumph of liberal development approach on how developing country solve their own development problems. It can also be seen as (ones again) a winning of liberal hegemonic system in the battle for hegemony over its opponents. Hence, the story so far is still the same: developing country is in the hand of developed country.*

**Key words:** Capitalism, Development, MDGs, resistance movements, hegemony

*Development is a perception which models reality, a myth  
which comforts society, and a fantasy  
which unleashes passions  
(Wolfgang Sachs: 1992)*

**PENDAHULUAN**

Pada awalnya kebijakan pembangunan lebih dikaitkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan negara. Tingkat keberhasilan pembangunan satu negara diukur pada seberapa tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan menggunakan pengalaman negara maju yang mencapai pertumbuhan ekonomi melalui proses liberalisasi ekonomi, konsep pembangunan pun di desain dalam konteks melakukan globalisasi ekonomi liberal. Janji akan terciptanya pertumbuhan ekonomi positif ketika negara berkembang mengimplementasikan konsep pembangunan liberal, menjadikan banyak negara berkembang menjalankan pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hasil dari program pembangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Hingga pertengahan tahun 1990an, tidak cukup banyak negara berkembang yang mengalami signifikansi perbaikan performa dalam tingkat pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan (Mosley and Week 1994, hal. 71). Justru, masalah sertaan dari pengadopsian model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi bermunculan. Mulai dari persoalan menajam-nya kesenjangan ekonomi, rusaknya lingkungan hidup hingga menurunnya tingkat kualitas hidup masyarakat.

Keterputusan antara program pembangunan yang dilaksanakan negara berkembang dengan hasil pembangunan menerbitkan perdebatan dalam memandang model pembangunan. Dalam sudut pandang pengkritik pembangunan, keterputusan antara janji pembangunan dengan hasil

pembangunan di negara berkembang merupakan kewajaran dikarenakan desain pembangunan yang digunakan terlalu mengagungkan konsep liberalisasi ekonomi yang memiliki tendensi untuk abai terhadap persoalan kemiskinan, lingkungan hidup maupun kualitas hidup masyarakat (Nurruzahman 2005, hal. 111). Kritik tersebut ditentang pendukung pembangunan yang melihat kegagalan pembangunan bukan dikarenakan penggunaan konsep liberalisasi ekonomi. Kegagalan terjadi justru karena situasi dalam negeri dari negara berkembang-lah yang tidak mendukung bekerjanya liberalisasi ekonomi secara sempurna (Lustig 2001, hal. 90-91).

Selain menimbulkan perdebatan ditingkat konsep, ketidakpercayaan terhadap model pembangunan liberal telah memunculkan berbagai gerakan perlawanan diberbagai negara berkembang. Terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap buruh telah memunculkan gerakan buruh. Rusaknya lingkungan alam akibat eksploitasi berlebihan terhadap alam demi pencapaian ekonomi telah memunculkan gerakan peduli terhadap lingkungan hidup. Disisihkan dan dikorbarkannya perempuan dan anak dalam aktifitas industri memunculkan gerakan persamaan gender.

Namun demikian, sejak awal tahun 2000 terjadi perubahan significant dalam perdebatan dan gerakan perlawanan terhadap model pembangunan berorientasi pertumbuhan. Dengan ditandai oleh kehadiran MDGs sebagai model pembangunan baru era millennium, mulai terjadi pengintegrasian secara global konsep, program hingga gerakan pembangunan. Tujuan utama dari dideklarasikannya MDGs dijadikan tujuan bersama dari aktor-aktor pembangunan yang sebelumnya memiliki tujuan yang beragam dan bahkan saling bertolak belakang.

Patut dicatat, kerjasama yang terjadi tidak hanya antar kelompok-kelompok yang sebelumnya memiliki agenda yang berbeda, namun juga antara kelompok yang menentang model pembangunan liberal dengan kelompok yang menjadi pendukung utama model pembangunan liberal. Ini ditandai dengan semakin seringnya terjadi kerjasama antara lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya cenderung kritis terhadap sepaik terjang dan resep Bank Dunia yang diberikan kepada Negara berkembang. Namun demikian, perdebatan konseptual tentang liberalisme ekonomi sebagai solusi atau masalah bagi perkembangan Negara berkembang menjadi menghilang seiring dengan penyatuan aksi bersama dalam rangka memenuhi target MDGs. Konsentrasi lebih diberikan kepada bagaimana memunculkan kreatifitas-kreatifitas produktif untuk sesegera mungkin menghadirkan keberhasilan mencapai target MDGs.

Mampukah MDGs menuntaskan janji keberhasilan pembangunan bagi negara berkembang? Apakah MDGs merupakan resep manjur bagi negara berkembang sehingga gerakan-gerakan yang sebelumnya beragam dan beroposisi terhadap konsep pembangunan liberal bersedia menyatukan diri menjadi aktor aktif pendukung proyek MDGs? Tidak perlu curigakah kita terhadap konsep MDGs yang sebagian besar penggagasnya adalah pendukung liberalisme ekonomi? Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas. Focus kajiannya akan lebih diarahkan pada usaha mencari tahu bagaimana proses terjadinya revolusi tindakan dari gerakan-gerakan yang sebelumnya merupakan gerakan anti-sistem (pembangunan liberal) menjadi gerakan tunggal mendukung MDGs yang *notabene* merupakan model lanjutan pembangunan liberal. Analisa akan dilakukan dengan mengikuti logika berpikir yang dikembangkan oleh Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Sebelum melakukan analisa terhadap revolusi tindakan dari gerakan anti system menuju gerakan pro-system, tulisan ini akan memaparkan terlebih dahulu perubahan konseptual model pembangunan yang mengiringi kehadiran MDGs.

## **Dari Model Pembangunan Berorientasi Pertumbuhan Ekonomi Menuju Pembangunan Berorientasi Penurunan Kemiskinan: Transformasi Semu dalam Aras Pelanggungan Sistem Hegemoni**

Dalam studi pembangunan, istilah pembangunan baru populer diakhir tahun 1940-an tepatnya ketika Harry S. Truman membagi dunia menjadi dua kategori: negara-negara di Selatan sebagai Negara dalam kategori terbelakang (*underdeveloped*) dan Negara-negara di Utara, utamanya Amerika Serikat sebagai negara yang telah mencapai tingkat pembangunan yang ideal serta perlu untuk ditiru oleh negara terbelakang (Sachs 1992: hal. 2).

Ukuran pembangunan dalam konsepsi Harry S. Truman adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pergerakan positif tingkat pendapatan di negara yang dikategorikan terbelakang (Esteva 1992: hal. 12). Simplifikasi pengertian dari istilah pembangunan sejatinya mengingkari pemaknaan kata pembangunan dalam ranah ilmu sosial sebelumnya, yang menempatkan kata pembangunan sebagai proses gradual dari perubahan sosial (Justus Moser dalam Esteva 1992: hal 8). Sehingga pada awalnya istilah pembangunan masih berada dalam wilayah netral karena tidak mengarahkan proses perubahan sosial pada konteks sosial tertentu.

Simplifikasi yang dilakukan oleh Harry S. Truman tentu saja tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak disengaja. Terdapat kepentingan yang membungkus simplifikasi pendefinisian pembangunan. Kepentingan tersebut adalah menjadikan negara barat sebagai referensi utama dalam proses perubahan sosial di negara terbelakang (Esteva 1992: hal 9). Pada akhirnya, jika negara terbelakang ingin mencapai level perubahan sosial sebagaimana yang ada di negara maju, jalan yang harus ditempuh adalah dengan melakukan pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi.

Konsepsi pembangunan Harry S. Truman selanjutnya diterjemahkan oleh lembaga-lembaga keuangan dan pembangunan internasional seperti World Bank, IMF, International Development Bank dalam bentuk asistensi pembangunan bagi negara terbelakang untuk keluar dari situasi keterbelakangan. Arah kebijakan yang dibuat oleh lembaga keuangan dan pembangunan internasional adalah melakukan restrukturisasi kondisi internal negara berkembang menuju kondisi yang akomodatif terhadap pengembangan liberalisme ekonomi. Dalam pandangan lembaga pembangunan internasional, hanya melalui integrasi dengan proses liberalisasi ekonomi global-lah, negara yang mengalami keterbelakangan akan mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonominya dan keluar dari situasi keterbelakangan (Waeyenberge 2006: hal.27, Onis and Senses 2005: hal. 256, Peet and Hartwick 1999, hal. 56).

Model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi ini menjadi populer dan berkembang di negara-negara di kawasan Amerika Latin, Afrika, hingga Asia. Terjadi penyeragaman orientasi pembangunan di negara-negara berkembang menuju arah pengintegrasian pada ekonomi global dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap perubahan struktural di negara berkembang ini dipercepat dengan digunakannya ketergantungan sumber pendanaan pembangunan dari negara berkembang. Kemauan menerapkan model pembangunan menjadi *conditionality* (persyaratan) bagi lancarnya perolehan hutang dari negara maju dan lembaga keuangan internasional. Praktis, sejak tahun 60-an akhir hingga tahun 80-an akhir, dua fenomena besar yang selalu melekat pada negara berkembang: hutang dan penyesuaian structural terhadap ekonomi global.

Sayangnya, model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan di berbagai negara berkembang hingga tahun 1980an tidak juga menunjukkan pemenuhan janji sucinya. Beberapa negara yang menggunakan model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi justru gagal menunjukkan performa yang bagus dalam pertumbuhan ekonominya. Proses integrasi ekonomi yang dilakukan justru membawa masalah baru bagi negara berkembang, yakni: meningkatnya jumlah orang miskin, melebarnya kesenjangan ekonomi, menurunnya kualitas kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, serta meningkatnya angka pengangguran (Mosley and Week 1994: hal. 71, Fine 2003: hal.1, Petras and Veltmeyer 2004, hal. 30).

Kritikan tajam terhadap hasil pembangunan tersebut bukannya menyurutkan promosi terhadap liberalisme ekonomi. Para pendukung model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi tetap melihat bahwa belum terpenuhinya janji pembangunan lebih dikarenakan oleh situasi internal dalam negara berkembang yang belum secara sempurna melakukan restrukturisasi ekonomi (*failed to adjust*) serta kesalahan negara tersebut dalam mengelola hutangnya (Lustig 1995: hal. 46). Yang perlu untuk dilakukan negara berkembang dalam persoalan kemiskinan dan masalah lainnya adalah meneruskan dan menyelesaikan restrukturalisasi ekonomi ke dalam perekonomian global serta ditambah dengan memperkuat kapasitas negara dalam mendesain program pembangunan yang berorientasi pada penurunan angka kemiskinan (Cling, Razafindrakoto and Rouboud 2002: hal. 12, World Bank dalam Waetenberge 2006: hal. 29).

Pembangunan berorientasi penurunan kemiskinan selanjutnya menjadi model baru pembangunan yang dipromosikan oleh lembaga keuangan dan pembangunan internasional. Model ini dianggap telah memperbaharui kelemahan dari model pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan ekonomi yang hanya berkonsentrasi pada rekonstruksi lingkungan ekonomi dari negara berkembang. Dalam model pembangunan ini, rekonstruksi lingkungan ekonomi harus diikuti juga rekonstruksi di bidang sosial dan politik (Stiglitz 1998, World Bank 1999 cited in Waeyenberge, pp.32-33; Pender 2001, pp. 407-408). Rekonstruksi sosial-politik dalam negara berkembang menyangkut: merubah negara agar lebih perhatian terhadap masalah kemiskinan, mendorong pelibatan, pemberdayaan dan kerjasama multiaktor dalam proses pembangunan, menempatkan orang miskin sebagai bagian integral dalam proses pembangunan, serta memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat (Hayami 2003: hal. 21- 57, Pender 2001: hal.408).

Model pembangunan berorientasi pada penurunan angka kemiskinan semakin diteguhkan menjadi desain pembangunan global ketika pada awal tahun 2000 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa 198 negara menyepakati untuk bersatu mencapai target pembangunan global yang terumuskan dalam Millennium Development Goals (MDGs). Dan dengan dimulainya era millennium, gagasan MDGs menjadi mantra baru dalam pembangunan. Paparan berikut akan melakukan tinjauan terhadap MDGs utamanya dalam menyingkap kepentingan terselubung dari promosi MDGs bagi negara berkembang.

### **Millennium Development Goals: Problem Baru dalam Bungkus Mantra Solusi**

Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Abad Millenium merupakan project pembangunan yang disepakati oleh banyak negara tentang target pembangunan global dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan pembangunan manusia (human development). Target utama yang ingin diraih dari dideklarasikannya MDGs adalah pada tahun 2015 secara global akan terjadi penurunan angka kemiskinan dunia sekaligus

terjadi peningkatan kualitas pembangunan manusia (*human development*) secara significant dan terukur.

Perhatian terhadap kemiskinan dan *human development* dari para pemimpin dunia tidak lepas dari fakta yang ada dimana tingkat kemiskinan dunia cukup tinggi yakni hampir setengah dari penduduk dunia hidup dengan uang kurang dari 2 dollar per hari, 800 juta mengalami kekurangan gizi dan kekurangan makanan, 600 juta kesulitan memperoleh air bersih serta 115 juta anak usia sekolah mengalami kesulitan meneruskan meneruskan pendidikannya (Koran Kompas 11 April 2006).

Data diatas menunjukkan bahwa ada persoalan ditingkat dunia terkait dengan capaian pembangunan yang telah berjalan. Dan jika dicermati, data global tersebut lebih cenderung menginformasikan bahwa negara-negara berkembanglah yang paling berkontribusi menyumbang besarnya angka-angka kemiskinan, kekurangan gizi dan makanan, kesulitan air dan sanitasi serta banyaknya anak putus sekolah.

Ironisnya, negara-negara yang mengalami degradasi kualitas hidup dan kemiskinan juga merupakan negara yang menerapkan model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Benua Afrika merupakan contoh kawasan yang negara-negarannya banyak menggunakan model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi namun gagal untuk mendapatkan kestabilan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan (Mafeje 2001, hal. 18). Bahkan, 36 Negara di benua Afrika semakin merosot prestasi ekonominya dilihat dari aspek akumulasi capital, investasi disektor public, investasi asing, serta pertumbuhan industry dan aktifitas export-nya (Laporan UNICEF dalam Lopes 1999: hal. 512). Di benua Amerika Latin dan Asia, model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi gagal menstabilkan situasi ekonomi kawasan serta menghindarkan terjadinya pengulangan krisis ekonomi. Terjadinya rentetan krisis ekonomi di kawasan Amerika Latin dan Asia di tahun 1997 serta di tahun 2007 telah berdampak pada kesulitan dari negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Asia untuk memiliki prestasi yang sama dengan bangsa Barat.

MDGs dihadirkan dalam konteks kerapuhan system kapitalisme. Ketika prestasi ekonomi, kualitas pembangunan manusia dan lingkungan hidup di negara berkembang mengalami kemerosotan, model baru pembangunan dibangun dengan memberikan tekanan lebih pada pembangunan ekonomi yang mendukung penuruan kemiskinan dan perbaikan kualitas manusia dan lingkungan. Jika dua konteks tersebut dihubungkan dan dilihat sebagai dua hal yang saling berhubungan maka bisa disimpulkan:

- a. Pengakuan Global atas kegagalan model pembangunan. Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi mulai diakui gagal dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.
- b. Model pembangunan sebagai akar masalah. Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi justru menjadi pemicu dari berlangsungnya kemerosotan kualitas hidup dan tingginya kemiskinan di negara berkembang
- c. Model pembangunan sebagai penjaga supremasi negara barat. Alih alih mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan kualitas human development, proyek pembangunan yang selama ini justru mempertahankan dan melebarkan jarak antara Negara maju dengan Negara-negara berkembang.

Kesimpulan diatas menjadi titik awal untuk mewaspadai arti kehadiran MDGs bagi negara berkembang. Benarkah MDGs menawarkan sesuatu yang baru? Adakah perubahan radikal dalam desain pembangunan yang ditawarkan dalam MDGs? Ataukah semangat yang dibawa

oleh MDGs masih sama dengan semangat yang dibawa oleh model-model pembangunan sebelumnya? Paragraf-paragraf dibawah akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dengan sebelumnya melakukan pembedahan terhadap konsep MDGs. Focus akan lebih diberikan pada bagaimana MDGs menempatkan pemerintah di negara berkembang, lembaga internasional dan pemerintah negara maju dalam desain baru model pembangunan abad millennium.

Berbeda dengan konsep pembangunan sebelumnya, MDGs memberikan tekanan yang cukup besar terhadap peran aktif dari negara miskin untuk melakukan tindakan konkret mengatasi persoalan di negara tersebut. (Brinkerhoff, Smith, and Teegen 2007; hal.1). Negara yang sebelumnya hanya dikonsepsikan sebagai '*watch dog*' penjaga berlangsungnya system kapitalisme, sekarang dituntut untuk memerankan fungsi barunya, mengawal proses liberalisasi ekonomi sekaligus mengatasi persoalan kemiskinan.

Selain mensyaratkan aksi konkret dalam negeri, MDGs juga telah membuat semua institusi keuangan dan pembangunan internasional menyatukan diri dalam satu aksi global mengarahkan semua program pembangunan, program hutang serta bantuan asistensi pembangunan dalam konteks pencapaian target MDGs (Brinkerhoff, Smith, and Teegen 2007; hal. 3). Bank Dunia, organisasi dalam naungan Persatuan Bangsa Bangsa, IMF, World Bank, AusAid, USAid, European Commission, OECD bersatu dan menjadikan MDGs sebagai payung dari keseluruhan kegiatan, asistensi dan bantuan keuangan kepada negara miskin dan terbelakang.

MDGs memberikan porsi keterlibatan yang besar bagi negara maju dalam pembangunan negara miskin (Brinkerhoff, Smith, and Teegen 2007; hal. 5). Dalam konsep MDGs, partisipasi aktif dari negara maju dalam mendukung program pembangunan dari negara miskin menjadi salah satu factor penentu keberhasilan capaian MDGs. Partisipasi aktif yang diharapkan dilakukan oleh negara maju adalah dalam hal peningkatan asistensi dibidang ekonomi, menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi yang menghambat prospek pertumbuhan ekonomi negara miskin, serta mengurangi atau menghilangkan hutang dari negara miskin (Brinkerhoff, Smith, and Teegen 2007; hal. 5).

MDGs memandang persoalan pembangunan sebagai masalah global sehingga penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen lintas aktor. Seluruh lembaga internasional dari badan di PBB, organisasi internasional, lembaga keuangan dan lembaga donor, lembaga pembangunan, sector swasta hingga organisasi masyarakat sipil dituntut untuk melakukan kerjasama untuk mencapai komitmen millennium (Annan 2001 dalam (Brinkerhoff, Smith, and Teegen 2007; hal. 5)

Dari tinjauan diatas, setidaknya ada beberapa hal yang menguatkan keraguan terhadap MDGs, yakni:

- (1) Tetap diberi porsi yang besar terhadap peran internasional dalam proses pembangunan di negara berkembang. Situasi ini menjadikan harapan terhadap memudarnya ketergantungan negara berkembang dalam menjalankan pembangunannya semakin menjauh. Justru, potensi pelanggaran relasi tidak seimbang (*unequal relation*) negara maju-negara semakin membesar.
- (2) Pemberian beban lebih kepada negara miskin untuk mengatasi masalah global. Target yang sedemikian prestisius dibebankan sebegini besar tanggung jawab-nya kepada negara miskin itu sendiri. Belum ada indikasi membesarnya dana bantuan dari negara maju setelah MDGs dilaksanakan. Datangnya dana dari negara maju lebih banyak dalam bentuk hutang dalam bungkus program pengentasan kemiskinan.

- (3) Tetap digunakannya model pembangunan berbasis ekonomi liberal. Pencapaian penurunan kemiskinan tetap dilakukan melalui penggunaan model pembangunan ekonomi liberal

Dapat disimpulkan, secara umum tidak banyak hal yang berubah dari dengan adanya MDGs. MDGs hanyalah mekanisme baru atas pelanggaran system kapitalisme. Pertanyaannya: jika tidak banyak yang berubah, kenapa banyak pihak di negara miskin mengamini dan merelakan diri menjadi actor pendukung MDGs? Jawabnya sangat sederhana: melalui MDGs, kelompok pendukung system kapitalisme telah menciptakan kesadaran semu (*false consciousness*) di masyarakat dunia tentang bentuk masyarakat yang ingin dihasilkan (baca: masyarakat kapitalis). Paparan dibawah akan membedah perjalanan pembentukan kesadaran semu (*false consciousness*) masyarakat global dengan sebelumnya melakukan tinjauan konseptual tentang Hegemoni dan gerakan sosial berbasis argument Antonio Gramsci, Ernesto Laclau, dan Chantal Mouffe.

### **Pergerakan Konsepsi Hegemoni: Dari perjuangan Meraih Hegemony Berbasis Kelas Ala Gramsci Menuju Perjuangan Meraih Hegemony Berbasis Proses Diskursif Ala Laclau dan Mouffe**

Sumber kekuasaan bisa berasal dari mana-mana. Namun, kelanggengan kekuasaan juga tergantung pada masyarakat dimana kekuasaan itu berlangsung, utamanya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap berjalannya kekuasaan. Proses perolehan persetujuan menjalankan kuasa dalam masyarakat inilah yang menjadi titik penting dari kajian tentang hegemoni, mulai dari Gramsci, Althusser, hingga Laclau dan Mouffe.

Bagi Gramsci, kekuasaan bisa diperoleh melalui dua mekanisme: *coercion* (paksaan) atau *consent* (persetujuan). *Coercion* mensyaratkan kapasitas melakukan tindakan kekerasan, sedangkan *consent* mensyaratkan kesukarelaan dan partisipasi. *Coercion* menjadi hak tunggal negara, *consent* milik dari civil society dan negara. Kuasa hegemoni selanjutnya dibentuk melalui pengorganisasian *consent* untuk meyakinkan individu atau kelompok-kelompok sosial menyepakati nilai-nilai dan norma-norma sosial yang melekat pada system yang tengah berlangsung tanpa penggunaan *coercion* (paksaan) (Gramsci dikutip dalam Jorgensen dan Philips 2002: hal. 32).

Gramsci melihat bahwa hegemoni merupakan hasil dari kontestasi kuasa antara pihak yang sedang berkuasa dengan pihak yang dikuasai (Stoddart ND: hal. 201). Kuasa hegemoni, dilanjutkan Gramsci, bekerja sempurna ketika satu kelompok sosial mampu menghadirkan dan menjaga *consent* dari keseluruhan komponen masyarakat (Gramsci 1986 dikutip dalam Hutagalung 2008; hal. Xxv, Stoddart Nd, hal. 201). Kemampuan sebuah kelas/kelompok untuk melakukan pengorganisasian persetujuan (dari penentang dan pendukung) inilah yang menjadi roh dari konsepsi Gramsci tentang hegemoni. Proses penciptaan hegemoni ini berlangsung dalam ranah pertarungan gagasan dengan melakukan konstruksi tentang ide yang sejatinya bias satu kepentingan menjadi ide yang diterima oleh semua kepentingan (Hutagalung 2008; hal. xxv).

Dalam pandangan Gramsci, hegemoni bukan menjadi keistimewaan satu pihak (yang berkuasa) semata, namun hegemoni dimungkinkan muncul dari pihak yang dikuasai. Dengan kata lain, mekanisme bekerjanya hegemoni berjalan dalam dua aras besar. Hegemoni bekerja dalam alur *top-down* (dari atas ke bawah) ketika kelas/kelompok yang berkuasa melakukan pelanggaran system yang sedang dijalankannya. Serta hegemoni yang bekerja dalam alur *bottom-up* (dari bawah ke atas) ketika kelas/kelompok yang tertindas melakukan resistensi terhadap system yang sedang menekannya (Gramsci dikutip dalam Hutagalung 2008; hal.

xxvii). Hegemoni dalam alur *bottom-up* merupakan sebuah *counter hegemony* terhadap system yang tengah mapan.

Konsepsi Gramsci tentang Hegemoni dilanjutkan oleh Laclau dan Mouffe dengan melakukan modifikasi yang ditujukan untuk menambal lubang-lubang konseptual Hegemoni ala Gramsci. Hegemoni dalam pandangan mereka adalah: “*a political type of relation, a form of politics*” (Laclau and Mouffe 1985: hal. 139). Hegemoni bisa tercapai melalui: “*the discursive connection of subject positions within the social realm*” (Stoddart ND, hal.206). Disini Laclau dan Mouffe menyatakan bahwa pertarungan kuasa dalam mencapai hegemoni berlangsung di wilayah *discourse* (wacana).Kemampuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap wacana dominan menjadi syarat utama memperoleh hegemoni (Laclau 1996; hal. 62). Dengan kalimat lain, kemampuan memenangkan pertarungan gagasan menjadi syarat syah bagi berlangsungnya suatu hegemoni.

Perbedaan yang dilakukan oleh Laclau dan Mouffe terhadap Gramsci juga menyangkut actor penggerak gerakan-gerakan sosial dalam kontestasi memperebutkan hegemoni. Pada point ini Laclau dan Mouffe mengkritik Gramsci yang terlalu memberikan peran besar kepada kelas buruh dalam melakukan gerakan *counter hegemony* pada negara. Menurut Laclau dan Mouffe, terlalu focusnya pada kelas buruh mengabaikan kelompok sosial lain yang juga memiliki potensi mengawal proses *counter hegemony* kepada system yang telah mapan (Hutagalung 2008; hal. Xxviii, Stoddart, Nd: hal. 207). Dan juga, simplifikasi pengkategorisasian masyarakat hanya dalam kelas proletar dan kelas borjuis telah mengakibatkan pengacuhan terhadap fakta adanya posisi-posisi lain yang dimiliki oleh individu-individu dalam masyarakat diluar kategori ekonomi semata. Kejelian dalam melihat fakta ini yang dirumuskan oleh Laclau dan Mouffe dalam memandang keberagaman *subject positions* menunjukkan karakter anti determinisme dari cara berpikir Laclau dan Mouffe.

Dilepaskannya hak istimewa kelas buruh sebagai pengawal gerakan sosial dalam kontestasi memperebutkan hegemoni menunjukkan pemisahan cara pikir Laclau dan Mouffe dengan cara pikir kaum Marxisme klasik. Bagi Laclau dan Mouffe, Kelas sudah tidak bisa lagi dipakai sebagai satu-satunya pondasi pembentukan identitas politik gerakan sosial. Karena, identitas politik memungkinkan dibangun secara bersama dengan kelompok sosial lainnya yang mendasarkan gerakannya bukan berdasarkan identitas klas (Stoddart Nd, hal.207). Pun juga, penindasan yang berlangsung dalam masyarakat kapitalisme tingkat lanjut juga telah mengalami perluasan penindasan, tidak hanya semata-mata penindasan majian (*borjuis*) terhadap buruhnya (*proletar*) (Mouffe 2000 dikutip dalam Hutagalung 2008; hal. xxiv). Penindasan juga dirasakan oleh kelompok pecinta lingkungan, perempuan, mahasiswa, masyarakat adat, etnis minoritas, kelompok keagamaan dan lainnya sebagai akibat dari proses ekonomi kapitalis yang sangat eksploitatif. Oleh karena itu, bagi Laclau dan Mouffe, gerakan-gerakan sosial baru diluar dari gerakan buruh patut diapresiasi sama dan memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat kapitalisme tingkat lanjut.

Dihilangkannya hak istimewa kelas buruh dalam cara berpikir Laclau dan Mouffe tidak dapat dilepaskan dari upaya mereka dalam melakukan kritik total terhadap bangunan teori marxisme klasik dalam membangun konsep masyarakat. Bagi Laclau dan Mouffe, kompleksitas relasi sosial kekinian sudah tidak memungkinkan untuk dipahami dalam logika sederhana Marxian yang mendasarkan pada pola relasi *suprastructure* (system politik) dan *base* (ekonomi) dimana *base* menentukan *suprastructure*. Bagi Laclau dan Mouffe, konsepsi tentang masyarakat bukan didasarkan pada persoalan apakah *base* menentukan *suprasturcture* ataupun *suprastructure* menentukan *base*, namun justru proses discursive dimana makna ditentukan adalah yang membentuk konsepsi tentang masyarakat (Jorgensen

dan Phillips 2001; hal.30-33). Artinya, masyarakat bukan hasil final dari sebuah proses relasi sosial, namun, masyarakat dibentuk dalam wilayah pemaknaan yang saling diperebutkan.

Gerakan sosial yang ada, jika ingin membentuk ‘masyarakat baru’ haruslah mampu melakukan pemenangan ditingkat proses diskursif melawan dominasi wacana kekinian (masyarakat kapitalisme). Disinilah peran konsepsi hegemoni Laclau dan Mouffe menjadi penting karena mampu menawarkan solusi praktis bagi proses perlawanan hegemoni ditingkat wacana. Menurut Laclau dan Mouffe, pertarungan perebutan hegemonik akan terjadi dikala situasi telah sedemikian antagonistik-nya yang menghadapkan kelompok penentang dengan kelompok yang ditentangnya dalam oposisi biner yang tegas. Situasi ini memungkinkan terjadinya proses kerjasama antar kelompok penentang untuk membangun *chain of equivalence* (jalinan kesamaan) dan memunculkan kebutuhan akan ‘tuntutan utama’ sebagai symbol perlawanan dari keseluruhan tuntutan terhadap system yang sedang mapan (Hutagalung 2008; hal. xxxvii).

Proses membangun *chain of equivalence* menurut Laclau dan Mouffe tidak hanya menjadi milik kelas tertentu tetapi menjadi kerja bersama antar subyek yang berbeda (Laclau dalam Stoddart ND, hal. 207). Jika proses ini bisa dikawal oleh kumpulan kelompok penentang yang memiliki keragaman dalam posisi sosial dimasyarakat untuk mampu menjadikan tuntutan utama sebagai kebutuhan bersama bagi keseluruhan kelompok (baik yang ditentang maupun yang mendukung), maka pada titik inilah hegemoni dari bawah berhasil ditegakkan.

Meski demikian, Laclau dan Mouffe tidak menafikan terhadap kemungkinan perlawanan dari kelompok penjaga system yang sedang menghegemoni dan hendak dilawan kelompok penentang. Menurut Laclau dan Mouffe, proses pembangunan *counter hegemony* dapat berujung pada kegagalan ketika kelompok penjaga system yang sedang menghegemoni melakukan kerja transformatif, menyerap sebagian tuntutan dari kelompok-kelompok yang menentangnya untuk merestorasi kepentingannya untuk memasukkan sebagian tuntutan dari kaum penentang menjadi bagian dari gagasan yang dimilikinya. Tepat ketika kemampuan melakukan transformasi hegemonik menguat, pada saat itulah batas politik (*frontier*) antar dua kelompok (kelompok penguasa dan kelompok penentang) menjadi menghilang (Laclau dan Mouffe dikutip dalam Hutagalung 2008; hal. xxxix). Menghilangnya batas politik ini berkonsekwensi pada dua hal. Pertama, bagi kelompok penguasa, kontradiksi dan antagonism berhasil ditekan keberadaannya sehingga keabsahan melakukan perlawanan terhadap system yang telah mapan menjadi dipertanyaan. Kedua, bagi kelompok penentang, identitas untuk membangun jalinan kesamaan runtuh disebabkan sudah tidak ada lagi hal yang mempertentang secara tegas antara kelompok penguasa dan kelompok penentangnya.

Untuk memberikan kejelasan konsep hegemoni Laclau dan Mouffe, tulisan ini akan mengambil pengalaman negara Indonesia dalam bergulat dengan gagasan pembangunan utamanya ketika bangsa Indonesia bersentuhan dengan wacana MDGs di awal abad Millennium.

### **MDGs dan Gerakan Perlawanan di Indonesia: Kemenangan Aksi Hegemonik Tranformatif dalam Menundukkan Gerakan-gerakan Perlawanan yang Beragam**

Kerentanan kekuatan ekonomi Indonesia kembali tergambar ketika kawasan Asia mengalami krisis ekonomi di tahun 1997. Capaian pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya selalu berada di atas 5 % tidak mampu dipertahankan menghadapi krisis financial yang menyebar di negara-negara Asia. Implikasi lanjutan dari kondisi diatas adalah terjadinya pembengkakan hutang, membesarnya angka kemiskinan dan menipisnya cadangan defisa negara.

Situasi factual yang terjadi di Indonesia dipenghujung tahun 1990an menunjukkan kegagalan pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi dalam menjaga stabilitas sekaligus membangun ketahanan ekonomi Indonesia. Optimisme yang selama ini dikampanyekan terhadap kemampuan system ekonomi liberal dalam menyelesaikan persoalan ketertinggalan capaian ekonomi negara terbantahkan oleh kondisi yang terjadi di Indonesia ketika nilai rupiah terpuruk dan berimplikasi pada menurunnya tingkat kemakmuran masyarakat sekaligus menjadikan angka kemiskinan meningkat.

Reaksi pun bermunculan. Demonstrasi besar-besaran dan aksi protes massal sebagai ekspresi perlawanan sosial terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya dari gerakan mahasiswa semata, namun juga gerakan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan beragam kepentingan juga bermunculan. Mulai dari gerakan yang mengagendakan perlindungan terhadap lingkungan, gerakan gender, gerakan perbaikan kualitas pembangunan manusia, gerakan masyarakat adat, gerakan reformasi hukum dan reformasi birokrasi, hingga gerakan kaum intelektual mengalami eskalasi aktifitas diberbagai wilayah Indonesia.

Meskipun memiliki bentuk perlawanan yang berbeda, akar dari gerakan perlawanan yang berkembang di penghujung tahun 1990an berasal dari sumber yang sama: system kapitalis yang eksploitatif. Dalam konteks analisis Laclau dan Mouffe, apa yang saat itu terjadi di Indonesia merupakan moment dimana telah tercipta *frontier* (batas politik) yang tegas antara kelompok penentang system kapitalis dengan gerakan perlawanan terhadap system kapitalis. Pada titik ini sejatinya kesempatan untuk membangun *chain of equivalence* (jalanan kesamaan) antar gerakan perlawanan yang beragam dan berserak untuk melakukan *counter hegemony* terhadap wacana dominan yang sedang berlangsung (system kapitalisme). Namun demikian, momentum yang telah hadir di Indonesia saat itu tidak berhasil dimanfaatkan secara maksimal oleh gerakan-gerakan perlawanan yang terbangun. Yang justru terlihat adalah mengentalnya ego-ego partikuler antar gerakan perlawanan dan keengganan untuk membangun 'tuntutan utama' sebagai symbol bersatunya gerakan perlawanan yang beragam di Indonesia. Implikasinya sangat jelas: gerakan perlawanan berjalan sendiri-sendiri memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Pada saat yang bersamaan, kelompok pendukung system kapitalisme justru melakukan konsolidasi menyeluruh. Hasil dari konsolidasi menyeluruh tersebut adalah terumuskannya model pembangunan baru dalam bentuk MDGs yang selanjutnya disebarluaskan secara global sebagai resep paling mujarab bagi penanganan masalah di negara berkembang. Secara cerdas, kelompok pendukung system kapitalisme memanfaatkan kealpaan kelompok penentangannya dalam menggunakan proses diskursif untuk membangun kesadaran semu masyarakat Indonesia tentang model pembangunan yang tepat bagi Indonesia. Model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi direkonstruksi ulang menjadi MDGs tanpa menghilangkan esensi dasarnya (pelanggaran system kapitalisme). Rekonstruksi ulang dilakukan dengan mengabsorpsi semua tuntutan particular yang selama ini digagas oleh gerakan-gerakan perlawanan dan diintegrasikan dalam bentuk model pembangunan baru yang mengakomodasi tuntutan terhadap pelestarian lingkungan, kualitas pembangunan manusia serta penurunan angka kemiskinan global. Dengan bantuan penyebaran informasi melalui media serta dukungan intelektual dan financial dari lembaga pembangunan dan keuangan internasional, secara perlahan namun pasti pendukung system kapitalisme menggenggam kembali hegemoninya melalui mekanisme yang transformative. Sebagaimana bisa dilihat dalam MDGs, tujuh target yang dirumuskan (mengurangi kemiskinan dan kelaparan, penyediaan pendidikan dasar, kesetaraan gender, mengurangi kematian ibu dan anak, mengurangi penyakit berbahaya, menciptakan lingkungan hidup yang

berkesinambungan) merupakan target-target spesifik yang sebelumnya menjadi target dari gerakan-gerakan perlawanan. Akomodasi sebagian kepentingan yang terkandung dalam MDGs memang tidak menyentuh pada akar tuntutan sebenarnya (yakni, tuntutan pergantian system kapitalis), namun demikian akomodasi kepentingan tersebut telah mampu untuk menghapus batas (*frontier*) yang sudah terbentuk sebelumnya dan sekaligus menciptakan kembali kesadaran semu tentang model pembangunan yang ideal bagi Indonesia.

Secara jelas bisa disimpulkan bahwa kehadiran MDGs di Indonesia telah mampu mengubah situasi secara drastis: menghilangkan *frontier* dan menghapus momentum konsolidasi gerakan perlawanan. MDGs berhasil dijadikan tujuan baru yang diamini baik dari kalangan pendukung maupun kalangan penentang system kapitalisme. Sebuah kemenangan gilang gemilang tanpa melalui tindakan paksaan. Keberhasilan yang dicapai melalui proses diskursif untuk melanggengkan hegemoni melalui mekanisme transformatif menciptakan kesadaran semu dalam masyarakat global. Sekali lagi, pertarungan hegemoni (kembali) dimenangkan oleh kelompok penguasa global yang berkiblat pada ekonomi liberal.

## SIMPULAN

Promosi MDGs dan reaksi kepatuhan melakukan penerimaan model pembangunan terkini dari negara maju sebagai solusi bagi persoalan kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang menunjukkan tidak berubahnya relasi negara maju vs negara berkembang. Negara maju tetap memfungsikan dirinya sebagai produsen pengetahuan dan negara berkembang tetap dijadikan sebagai konsumen pengetahuan dari negara maju. Kemampuan untuk selalu menjadi produsen pengetahuan ini telah memberikan *power* (kuasa) kepada negara maju untuk selalu melakukan control terhadap negara berkembang. MDGs sebagai produk inovatif terkini dan telah dijadikan mantra baru bagi proses pembangunan di negara berkembang hanyalah menjadi penegasan kemampuan hegemonik system kapitalisme dalam meredam dan mematahkan gerakan-gerakan perlawanan sosial. Ketiadaan tindakan dari gerakan-gerakan perlawanan dalam ranah kerja-kerja diskursif membangun wacana tandingan (anti system kapitalisme) menjadi titik lemah dari gerakan perlawanan di Indonesia. Satu pekerjaan rumah bagi kaum penggiat gerakan sosial untuk merumuskan langkah strategis kedepan membangun *counter hegemony* yang terkonsolidasi.

Bisa disimpulkan bahwa konsep pembangunan baru dalam bentuk MDGs pada akhirnya perlu dilihat sebagai mekanisme penjinakan baru bagi gerakan perlawanan (system kapitalisme) yang berkembang di Indonesia. Tidaklah berlebihan jika Arturo Escobar menyatakan bahwa: konsep pembangunan dari negara maju hanyalah sebuah mekanisme pendisiplinan dan mekanisme membangun kepatuhan masyarakat dunia ketiga (Escobar 19; hal. 206).

## DAFTAR RUJUKAN

- Brinkerhoff, J, Smith, S, Teegen, H 2007, *NGOs and the Millennium Development Goals: Citizen Action to Reduce Poverty*, Palgrave-McMillan, New York
- Escobar, A 1984, *Discourse and Power in Development: Michael Foucault and The Relevance of his Work to The Third World*, *Alternative X* (Winter 1984-1985), hal. 377-400
- Esteva, G 1992, Development, dalam Sachs, W (ed.) 1992, *The Development Dictionary: a Guide to Knowledge and Power*, Zeds Books, London & New Jersey
- Fine, B 2006, The New Development Economic in Jomo K.S and Fine, B, *The New Development Economics: After the Washington Consensus*, Zed Book, London and New York
- Hutagalung, D 2008, Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe, dalam Laclau, E dan Mouffe, C, *Hegemoni dan Strategi Sosialis (terjemahan)*, Resist Book, Yogyakarta
- Hayami, Y 2003, From the Washington Consensus to the Post-Washington Consensus: Retrospect and Prospect, *Asian Development Review*, Vo. 20, No. 2, pp. 40-65
- Hayami, Y and Akiyama, S 2003, From the Washington Consensus to the post-Washington Consensus: Recent Changes in the Paradigm of International Development Assistance, Foundation for Advanced Studies on International Development, viewed online..
- Jorgensen, M and Phillips, L 2002, *Discourse Analysis as Theory and Method*, Sage Publications, London
- Laclau, E 1996, Deconstruction, Pragmatism and Hegemony in Mouffe, C (ed.), *Deconstruction and Pragmatism*, Roudtledge, London
- Laclau, E and Mouffe, C 2008, *Hegemoni dan Strategi Sosialis (terjemahan)*, Resist Book, Yogyakarta
- Lopes, C 1999, Are Structural Adjustment Programmes an adequate response to Globalisation, UNESCO, viewed online, in [www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1468-2451.00222](http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/1468-2451.00222)
- Lustig, N 1995, The 1982 Debt Crisis, Chiapas, NAFTA, and Mexico's Poor, *Challenge*, Vol. 38, No. 2, pp. 45- 50
- Lustig, N 2001, Life is not easy: Mexico's quest for stability and growth, *Journal of Economic Perspectives*, vol. 15, no. 1, pp. 85-106
- Mafeje, A 2001, Conceptual and Philosophical Predispositions, in Wilson, Kanji, Braathen (Eds.), *Poverty Reduction: What Role of The State in Today's Globalized Economy?*, Zed Books Ltd, London

- Mosley, P and Weeks, J 1994, Adjustment in Africa, *Development Policy Review*, Vo. 12, pp. 319 – 329
- Nuruzzahman 2005, Economic liberalization and poverty in developing county, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 35, Issn.1, p. 109-127
- Onis, Z and Senses, F 2005, Rethinking the Emereging of Post Washington Consensus, *Development and Change*, Vol. 36, No. 2, pp.263-290
- Pender, J 2001, From ‘Structural Adjustment’ to ‘Comprehensive Development Framework’: conditionality transformed?, *Third World Quarterly*, Vol. 22, No. 3, pp. 397-411
- Peet, R and Hartwick, E 1999, Theories of Development, The Guilford Press, New York
- Rapley, J 2007, *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World*, Lynne Rienner Publishers,Inc, London
- Sachs, W (ed.) 1992, *The Development Dictionary: a Guide to Knowledge and Power*, Zeds Books, London & New Jersey
- Stoddart, M ND, Ideologi, Hegemony, Discourse: a Critical Review of Theories of Knowledge and Power, *Journal of Social Thought & Research*, Vol. 28
- Van Waeyenberge, E 2006, From Washington to Post-Washington Consensus: Illusions of Development in Jomo K.S and Fine, B , *The New Development Economics: After the Washington Consensus*, Zed Book, London and New York